

KERUSUHAN SOSIAL: KASUS PEMILIHAN KEPALA DESA SIRAU PURBALINGGA

Social Riot: A Case of Village Head Election in Sirau Purbalingga

Bambang Suswanto¹, Sunyoto Usman², dan Lambang Trijono³

*Program Studi Ketahanan Nasional
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

The election of a village head is an example of democracy in the village society. However, it becomes a problem when the election of a village head does not follow the rule. This research study aims to explore what factors cause the riot and why it happens in the election of the village head.

The result of the research shows that the social riot results the accumulation of disappointment due to the election result that does not match with people expectation. The disappointments include the lost of candidate they support, the misuse of committee authorities in doing their job so they are not neutral.

Some factors that cause social riot can be classified into two, they are indirect and direct factors. The indirect causes are conflict in society caused by the misuse of Bangdes fund by the ex-village leader. The competition between the candidates in getting the voter is not fair, so abuses occur in the village head election. Moreover the committee of election is not neutral and not fair in doing their job. It is caused by the pressure of people who have some interests in the election. The direct causes of the social riot are the announcement of the vote calculation in which mass, know that the candidate they support lose and they are mobilized by *botoh* to make a social riot.

When the social riot occurred the security guard could not predict it so they could not handle the riot. As a consequence, the riot spread to the whole village. To handle the riot, the security guard supported the police (*Brimob*) and *TNI Batalyon 406 Purbalingga* stop the riot.

Key Words : *Social Riot -- Head Village Election*

PENGANTAR

Latar belakang

Pemilihan Kepala Desa sebagai pesta demokrasi di pedesaan pada akhir-akhir ini mulai dipertanyakan, seiring dengan munculnya kasus-kasus pada proses pemilihan Kepala Desa yang menimbulkan berbagai tindak kerusuhan.

Beberapa kasus yang muncul pada proses pemilihan Kepala Desa dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa periode bulan Oktober sampai Desember 1997 yang lalu. Salah satu peristiwa yang terjadi di desa Sundoluhur, kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Dalam proses pemilihan Kepala Desa diwarnai dengan kerusuhan massa, sehingga menimbulkan gedung balai desa terbakar, mobil petugas dirusak dan salah seorang terkena peluru nyasar saat petugas melakukan pengamanan (Kompas 14 Desember 1997).

Selanjutnya kasus-kasus kerusuhan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa juga terjadi pada putaran pertama dan kedua di Kabupaten Purbalingga diwarnai dengan kerusuhan. Diantaranya adalah di Desa Sirau dan Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, Desa Makam Kecamatan Rembang, Desa Mipiran Kecamatan Padamara dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari.

Peristiwa kerusuhan di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga terjadi setelah dilakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam perhitungan suara ternyata hasilnya dimenangkan salah satu calon Kepala Desa yang bernama Priyo Raharjo. Dengan terpilihnya Priyo Raharjo menimbulkan reaksi yang datang dari para pendukung yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa, mereka merasa kecewa tidak puas dengan hasil yang dicapai oleh calon yang memenangkan pemilihan Kepala Desa. Sebagai pelampiasan rasa kecewa mereka melakukan pengrusakan fasilitas umum yang terdiri dari Balai Desa, Polindes dan Gedung Sekolah Dasar serta penggilingan padi dan pembakaran pakaian seragam Hansip (Kedaulatan Rakyat, 27-11-1998).

Menurut warga masyarakat terjadinya kerusuhan disebabkan oleh adanya dugaan tindakan panitia pemilihan Kepala Desa yang melakukan kecurangan, sehingga menguntungkan salah satu calon. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap ketua panitia pemilihan Kepala Desa tidak mau mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa. Maka dari itu Camat selaku pengawas pemilihan kepala desa yang mengambil alih untuk mengumumkan. Pada waktu menjelang berakhir membacakan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa,

kemudian terjadi peristiwa kerusuhan dengan adanya pelemparan batu dan pembakaran tempat pemungutan suara serta Balai Desa.

Melihat fenomena diatas membuktikan bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak mencerminkan demokrasi, karena dalam pelaksanaan banyak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga berdampak terjadinya tindakan kerusuhan sosial.

Peristiwa-peristiwa kerusuhan pada dasarnya sangat menarik karena unik yaitu bersifat lokal dan partikular. Selain memiliki sifat unik peristiwa kerusuhan tersebut memiliki ciri-ciri umum, diantaranya adalah bersifat massal, kolektif, muncul secara spontan, dan cenderung menggunakan aksi kekerasan (*violence*). Perbedaan latar belakang, struktur sosial, ekonomi dan kultural serta permasalahan lokal yang ada pada setiap daerah, sehingga menjadi ciri lokal masing-masing peristiwa kerusuhan (Suryo, 1997:5).

Berpijak dari data diatas, kiranya cukup penting dan menarik untuk meneliti tentang kerusuhan sosial dalam pemilihan Kepala Desa.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi kerusuhan sosial dalam pemilihan kepala desa dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya?

Tinjauan Teori

Dalam menganalisis kerusuhan sosial yang terjadi di Sirau, Purbalingga pada tanggal 25 Nopember 1998 yang lalu, beberapa kerangka teori yang dapat dipakai guna mengkaji masalah ini, diantaranya adalah teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurr, dalam bukunya yang berjudul *Why Men Rebel* (1971). Dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan politik seperti kerusuhan adalah :

Semua serangan kolektif dalam sebuah komunitas politik melawan rezim politik, para aktor yang meliputi kelompok-kelompok politik dan penguasa yang bertikai. Konsep itu mewakili serangkaian kejadian dengan menggunakan ancaman secara bersama. Konsep ini termasuk didalamnya tentang revolusi, perang gerilya, kudeta, pembontakan dan kerusuhan (Gurr, 1971: 3-4).

Dari kerangka teori ini kerusuhan sosial di Sirau, Purbalingga memunculkan keprihatinan yang selama ini dirasakan oleh warga

masyarakat. Kondisi tersebut antara lain adanya penyalahgunaan wewenang penguasa desa yaitu Kepala Desa yang menyelewengkan dana-dana bantuan desa. Penggunaan dana bantuan desa oleh Kepala Desa tidak jelas kemana wujudnya, sehingga oleh warga masyarakat digugat untuk bertanggung jawab. Namun sampai Kepala Desa habis masa jabatannya, masalah itu tidak ada penyelesaiannya. Kondisi ini menjadi potensi lahirnya kerusuhan di Sirau, Purbalingga.

Dari kaca mata perspektif sosiologi, kerusuhan adalah merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat sedang "sakit", dimana faktor *non-adaptive* lebih berkembang daripada faktor *adaptive* (Usman, 1998; 138). Dalam kondisi demikian, masyarakat sedang dilanda krisis nilai dan norma sosial. Nilai-nilai sosial lama disosialisasikan tidak lagi mampu dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan interaksi sosial.

Di samping itu norma-norma sosial yang tidak mampu mengendalikan arah perilaku anggota masyarakat ketika ada kekecewaan karena berbagai harapan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, politik maupun kultural tidak dapat dicapai. Garis ekspektasi telah berkembang sedemikian rupa meninggalkan garis apa yang dicapai.

Menurut Laurence Ross (1963) garis ekspektasi memang hampir tidak pernah bersinggungan dengan apa yang dicapai, tetapi ketika jarak antara dua garis tersebut masih dalam ambang batas toleransi maka biasanya tidak menimbulkan masalah. Kerusuhan akan muncul kepermukaan ketika jarak antara kedua garis tersebut melewati ambang batas toleransi. Apa yang dapat dicapai oleh masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti apa yang mereka harapkan dan apa yang dicapai tidak melahirkan kerusuhan selama masih dalam batas toleransinya. Kerusuhan akan muncul ketika perbedaan tersebut berada diluar ambang batas toleransinya. Oleh karena itu masyarakat membangun mekanisme sendiri untuk mengembangkan toleransi, maka kapan terjadi kekerasan sebenarnya tidak mudah diprediksi.

Dalam masyarakat tertentu toleransi itu bisa relatif longgar bila masyarakatnya pandai melakukan adaptasi, meskipun harus dibayar dengan berbagai macam pengorbanan. Namun dikalangan masyarakat tertentu toleransi itu tidak dapat bertahan lama, apabila pemenuhan kebutuhan mereka tidak mudah ditunda, sehingga benih-benih kerusuhan mudah sekali tumbuh dan berkembang (Usman, 1998:139).

Ted Robert Gurr menyebutkan bahwa kekerasan seperti kerusuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara (Ted Gurr, 1971:3) Selanjutnya Gurr mengatakan bahwa yang menjadi penyebab kerusuhan adalah faktor

psikologis yaitu suatu perasaan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan. Secara ringkas pendapatnya adalah bahwa kekerasan politik pada aras komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas dikalangan masyarakat. Terutama dalam wujud "*relative deprivation*", yaitu ketidaksesuaian antara "*value expectation*" masyarakat (yaitu harapan akan barang-barang atau kondisi hidup yang mereka yakini sebagai hak) dengan "*value capability*" mereka (yaitu barang-barang atau kondisi yang mungkin mereka peroleh atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan). Kondisi deprivasi itulah yang menimbulkan frustrasi. Jika intensitas frustrasi itu semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat termasuk kaum elit, maka kerusuhan yang muncul akan semakin meluas. Dengan kata lain frustrasi masyarakat karena deprivasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindak kekerasan politik seperti kerusuhan.

Kemudian kalau dicermati bahwa makin besar kecenderungan fenomena deprivasi dalam masyarakat, makin memungkinkan terjadinya budaya kerusuhan. Dengan kata lain sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan seperti kerusuhan adalah karena berkembangnya ketidakpuasan.

Menurut Ted Gurr ada tiga pola deprivasi relatif. *Pertama*, "*descremental deprivation*" yaitu suatu kondisi dalam mana nilai yang diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara pada saat yang sama nilai kapabilitas yang ada mengalami penurunan. Kesenjangan yang ditimbulkan dengan menurunnya nilai kapabilitas, menurut konsep ini, akan menimbulkan perasaan kecewa atau frustrasi. Perasaan semacam itu sebagai pangkal awal munculnya tindakan membrontak.

Kedua, "*aspiration deprivation*" yaitu merupakan suatu kondisi dalam mana nilai yang diharapkan mengalami kenaikan, sementara pada saat yang sama nilai kapabilitas berada dalam keadaan statis atau tidak berubah. Kesenjangan yang disebabkan naiknya harapan sementara kemampuan untuk mewujudkan harapan tadi dalam keadaan tidak berubah. Keadaan ini menjadi penyebab munculnya perasaan frustrasi atau kecewa. Kondisi semacam ini tindakan melawan atau membrontak dapat muncul dipermukaan.

Ketiga, "*progresive deprivation*" yaitu suatu kondisi dalam mana nilai yang diharapkan yang terdapat suatu masyarakat mengalami kenaikan, sementara nilai kapabilitas yang ada juga mengalami kenaikan. Kesejajaran kenaikan antara dua nilai ini untuk sementara waktu masih

berlangsung, akan tetapi pada waktu tertentu nilai yang diharapkan masih mengalami kenaikan, nilai kapabilitas berhenti proses kenaikannya dan malahan bergerak menurun. Adanya kenaikan nilai yang diharapkan secara kontinyu dan berhentinya proses kenaikan nilai kapabilitas yang malahan disusul dengan gerak menurun, akan menimbulkan kesenjangan yang pada gilirannya juga menciptakan perasaan kecewa atau frustrasi. Kondisi ini menimbulkan tindakan melawan atau membrontak (Gurr, 1971: 46-53).

Menurut Johan Galtung, kekerasan seperti kerusuhan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensinya secara wajar. Namun menurut Galtung menambahkan bahwa penghalang itu adalah sesuatu yang dapat dihindarkan. Dengan kata lain kekerasan seperti kerusuhan dapat dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan (Galtung, 1980: 67).

Selanjutnya dikemukakan bahwa kekerasan seperti kerusuhan dibedakan menjadi dua jenis kekerasan yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain. Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah merupakan sesuatu yang ada didalam suatu struktur. Sementara kekerasan langsung dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Sedang kekerasan struktural terjadi begitu saja dengan sendirinya tidak ada aktor yang melakukannya.

Bentuk kekerasan struktural secara realitas nampak dalam situasi ketidakadilan, dan diskriminatif. Hal ini mengisaratkan bahwa kekerasan struktural diciptakan oleh manusia atau struktur kekuasaan. Situasi ini dapat dikembalikan pada strukturnya yang jelek. Ini berarti bahwa kekerasan struktural sudah menjadi bagian yang inheren dan tersembunyi dibalik struktur kekuasaan (Uhaib, 1998: 75).

Pola kekerasan struktural sering digunakan untuk melegitimasi stabilitas kekuasaan. Kekuasaan struktural biasanya memiliki bias kekerasan revolusioner yang melengkapi lingkaran kekerasan. Ditengah ketidakberdayaan dan ketertindasan, biasanya orang mencari bentuk-bentuk alternatif dalam rangka menemukan penyelesaian kekerasan.

Berbeda dengan pendapat Don R. Bowen dan Louis H. Masotti yang mengatakan bahwa kekerasan sipil (*civil violence*) adalah suatu kekerasan yang bertujuan untuk melakukan perlawanan secara langsung terhadap orang-orang, barang-barang yang merupakan simbol-simbol dari politik pemerintahan sipil (Masotti, dkk, 1968: 13). Untuk membedakan kekerasan sipil dengan kekerasan lainnya sangat sulit, karena bentuk

kekerasan dalam berbagai peristiwa memiliki kategori yang beragam. Namun demikian dapat dibedakan dengan kerusuhan. Adapun perbedaannya antara kerusuhan dengan kekerasan sipil adalah bahwa kerusuhan tidak memperlihatkan usaha untuk mendapatkan kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Sedangkan kekerasan sipil seperti revolusi, kudeta, perang gerilya, perang sipil pada umumnya memiliki tujuan kearah usaha dalam meraih kekuasaan. Walaupun demikian bukan berarti kerusuhan tidak dapat berkembang menjadi revolusi.

Hal demikian kalau diambil kesimpulan bahwa kerusuhan merupakan suatu kasus dalam pengertian kekerasan sipil secara umum, karena tindakan kerusuhan itu bukan untuk merebut kekuasaan politik, melainkan hanya untuk supaya diperhatikan, sebagai rasa ketidakpuasan dan kekecewaan.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan sipil adalah pertama, adanya perasaan tidak puas yang diperoleh karena perbandingan antara apa yang dinikmati sekarang dengan apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan tidak sesuai. Ada jarak atau perbedaan antara kenyataan dengan keinginan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dengan kata lain karena apa yang di dapat dengan apa yang diharapkan berbeda atau tidak seimbang, maka timbulah ketidakpuasan atau frustrasi.

Kedua, adanya konflik kelompok yang merupakan hasil dari perjuangan kelompok dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, seperti etnis, ras, agama, pembagian wilayah, kepemimpinan dan sebagainya. Sikap saling menyerang satu sama lain, sebagai cermin perbedaan sosial itu yang menimbulkan kekerasan sipil. Tetapi dengan adanya konflik antar kelompok kekerasan dapat menjadi semakin meningkat.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kekerasan sipil terjadi karena disebabkan oleh adanya pemerintahan yang kehilangan legitimasi. Tetapi apabila legitimasi itu masih ada, maka kekerasan sipil hanya akan muncul berupa kerusuhan sosial. Untuk menyelesaikan kekerasan sipil pemerintah harus memiliki kapasitas sistem yang berhubungan dengan kemampuan untuk merespon kekerasan sipil dengan kekuatan untuk melakukan perubahan. Penyelesaian dengan kekuatan tersebut dilakukan setelah pemerintah dapat mengamankan tindakan kekerasan sipil tersebut dengan cara bersenjata.

Munculnya perasaan ketidakadilan dikalangan masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendorong kerusuhan sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa terjadinya gerakan

in oleh faktor struktural seperti yang dikemukakan di sini menyebutkan bahwa gerakan revolusioner disebabkan oleh dominasi kelompok elite. Dominasi menentukan perkembangan negara melahirkan revolusi, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang menimbulkan kelompok-kelompok yang saling

bermusuhan.

Kerangka teori lain yang membahas mengenai kerusuhan sosial adalah George Wada dan James C. Davies yang mengatakan bahwa kerusuhan adalah suatu bentuk kelompok yang terorganisasi untuk mengekspresikan perasaan protes yang begitu kuat ke dalam bentuk kekerasan (Wada, dkk., 1957: 864). Selanjutnya dikatakan kerusuhan merupakan organisasi ilegal atau tidak sengaja terbentuk dalam waktu yang tidak lama dan keanggotaannya secara sukarela.

Kerusuhan pada mulanya jarang dianalisa karena kesulitan untuk memprediksi waktu dan tempat kejadian serta orang-orang yang terlibat didalamnya. Tetapi sekarang merupakan obyek yang penting karena kehadirannya menimbulkan kegelisahan sosial. Jika hal itu tersebar dapat menimbulkan pembontakan atau revolusi. Kegelisahan dan ketidakpuasan yang mendorong untuk beraksi untuk mengacaukan kehidupan dengan tidak memandang kaya-miskin, tua-muda dan pejabat-non pejabat, sehingga menyebabkan perusuh (*rioter*) melakukan reaksinya terhadap kondisi atau situasi yang terjadi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Gary T. Marx yang mengatakan bahwa kerusuhan adalah suatu kelompok kekerasan yang bersifat spontan yang berlawanan dengan norma-norma tradisional (Marx, 1972: 50). Untuk mengetahui ciri-ciri kerusuhan sangat sulit karena kurangnya konsep-konsep ukuran guna mengklarifikasikannya.

Dari kerangka teori diatas kiranya dapat dijadikan konstruksi analisis dalam memahami tentang kerusuhan sosial di Sirau Purbalingga.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara metode survai yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989: 156). Adapun sebagai populasinya adalah warga masyarakat desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya analisis data digunakan statistik deskriptif, guna mengolah data yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan alat yang

digunakan adalah tabel-tabel frekuensi yang memuat dua kolom yaitu jumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori. Dengan cara ini distribusi jawaban dengan mudah diamati dan diinterpretasikan hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dapat dihasilkan bahwa apa yang dikonsepsikan dalam kerangka teori yang menyatakan kerusuhan sosial dapat terjadi karena adanya perasaan tidak puas atau kecewa, setelah melihat realita yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dari hasil temuan dilapangan dalam peristiwa kerusuhan sosial di Sirau pada tanggal 25 Nopember 1998 yang lalu.

Sebetulnya tanda-tanda akan terjadi kerusuhan sosial sudah mulai nampak jauh sebelumnya. Pada waktu sekitar bulan Agustus 1998 masyarakat desa Sirau melakukan unjuk rasa kepada Kepala Desa untuk menuntut agar supaya mempertanggung jawabkan dana-dana Bangdes yang tidak jelas kegunaannya. Kondisi inilah yang membuat masyarakat Sirau mulai ada benih-benih konflik dengan kepala desa. Kemudian sampai kepala desa habis masa jabatannya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga warga masyarakat desa Sirau sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa sebenarnya sudah ada konflik antara warga dengan kepala desa. Kondisi inilah yang menciptakan iklim subur akan terjadinya kerusuhan sosial.

Dengan dilaksanakan pemilihan kepala desa di Sirau konflik yang ada di masyarakat intensitasnya meningkat setelah dalam proses pemilihan kepala desa mengalami berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh warga masyarakatnya maupun oleh pihak aparat panitia, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sumber ketidakpuasan atau kekecewaan antara lain yang dilakukan oleh para calon kepala desa yaitu pada waktu kampanye terjadi bentrok antar sesama pendukung yang mempermasalahkan tentang penyobekan tanda gambar. Disamping itu juga mempermasalahkan adanya dugaan pembelian suara dengan cara melakukan serangan fajar oleh para pendukung untuk mendatangi warga dengan memberi sejumlah uang, agar memilih calon kepala desa yang diinginkan. Kemudian penyimpangan yang dilakukan oleh pihak panitia yaitu dalam melaksanakan tidak bertindak netral dan adil. Hal ini nampak pada waktu pencoblosan suara ada warga masyarakat yang mencoblos lebih dari satu kali dengan membawa undangan yang berbeda, sehingga dapat merugikan salah satu calon. Selanjutnya juga tidak melakukan

perhitungan suara di depan massa yang hadir, melainkan dilakukan secara tertutup, sehingga membuat massa kecewa. Hal ini pada waktu selesai perhitungan ternyata panitia tidak mau mengumumkan hasilnya, sehingga yang mengumumkan hasil perhitungan suara adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh camat.

Dengan terakumulasinya kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan intensitas kekecewaan meningkat. Keadaan ini seperti yang dikemukakan oleh Ted Gurr, apabila intensitas kekecewaan meningkat semakin tinggi sampai menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah, maka kerusuhan dapat meletus (Gurr, 1971: 6).

Kerusuhan sosial merupakan ungkapan protes warga masyarakat karena adanya ketimpangan struktural yang oleh Ted Gurr melahirkan suatu kondisi deprivasi relatif, yaitu suatu kondisi psikologis masyarakat dimana dihadapkan pada pilihan antara harapan dan kenyataan semakin jauh jarak perbedaan, sehingga menimbulkan kekecewaan yang pada akhirnya dapat menjadi kerusuhan sosial.

Beberapa Faktor Penyebab Kerusuhan Sosial

Persaingan antar calon kepala desa

Penelitian ini menemukan bahwa kerusuhan sosial yang terjadi di Sirau pada waktu diselenggarakan pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa ini muncul dua calon yang mewakili kelompok kubu masing-masing yang bersaing untuk dapat meraih kursi kepala desa.

Persaingan dalam pemilihan kepala desa terjadi karena sistem kepemimpinan dalam masyarakat desa pada umumnya masih bersifat *polymorphic* (Usman, 1996: 5). Dalam sistem tersebut struktur kekuasaan di desa berbentuk kerucut, sehingga kegiatan pemilihan kepala desa di desa itu merupakan suatu bentuk persaingan atau kompetisi antara pendukung masing-masing.

Keadaan seperti diatas terjadi di Sirau dimana persaingan dua kubu yaitu antara kubu calon kepala desa Priyo Raharjo dengan kubu calon kepala desa Casno Riyadi. Dalam persaingan untuk meraih kursi kepala desa dilakukan dengan cara mengerahkan segala potensinya, karena jabatan kepala desa dimasyarakat bukan semata-mata untuk merebut kursi kepala desa saja melainkan sebagai kompetisi dalam mempertaruhkan gengsi dan prestise. Namun karena persaingan yang dilakukan dengan cara mengerahkan segala potensinya, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau *fair*. Hal ini nampak

dari temuan di lapangan terjadi pelanggaran atau menyimpang dari aturan yang berlaku, seperti pembelian suara atau suap yang dilakukan oleh masing-masing calon. Sebagai akibatnya terjadi perang suap karena antar calon kepala desa dalam membeli suara tidak sama. Kondisi semacam ini yang menimbulkan masalah, sehingga dapat menjadi peluang terjadinya kerusuhan sosial.

Penyalahgunaan wewenang panitia pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dilapangan menunjukan bahwa dari 135 responden yang disebar menghasilkan tanggapan 67 responden atau 49, 6 persen menyatakan bahwa kerja panitia dalam menjalankan tugas tidak melaksanakan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam perhitungan suara menurut peraturan daerah No. 7 tahun 1983 dilakukan dihadapan massa pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara secara terbuka. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertutup dalam ruang Balai Desa yang dihadiri para saksi dan panitia.

Penyalahgunaan wewenang panitia pemilihan kepala desa yang telah mengeluarkan kebijakan yang tidak benar merupakan salah satu faktor timbulnya kerusuhan sosial. Keadaan demikian membuktikan bahwa adanya dominasi aparat pemerintah yang menentukan kebijakan yang tidak adil, sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan gerakan revolusioner (Scopol, 1979: 29). Penyalahgunaan wewenang oleh panitia pemilihan kepala desa dapat dikatakan sebagai faktor struktural, karena panitia memberikan peluang yang menguntungkan pada salah satu calon kepala desa. Hal ini nampak pada tugas panitia pemilihan kepala desa yang tidak netral dan *fair*, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kekecewaan massa pendukung yang kalah.

Apabila dicermati secara saksama kekecewaan, ketidakpuasan dan kemarahan warga masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya kerusuhan secara langsung lebih berhubungan dengan adanya perlakuan yang tidak adil oleh panitia pemilihan kepala desa, sehingga ada pihak yang dirugikan.

Dari hasil temuan dilapangan menyatakan bahwa 63 responden atau 46,6 persen dari 135 responden yang disebarkan dalam masyarakat menunjukkan adanya perasaan kecewa dengan hasil pemilihan kepala desa. Kekecewaan itu terjadi setelah mendengar pengumuman calon yang didukung tidak berhasil menjadi kepala desa. Dengan kekalahan

calon kepala desa yang didukung, maka dapat dikatakan pupuslah sudah harapan yang diinginkan oleh warga untuk mendapatkan kepala desa yang diinginkan. Hal demikian seperti yang digambarkan oleh Ted Gurr dalam istilah deprivasi relatif yaitu apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kondisi tersebut yang menjadi peluang terjadinya kerusuhan sosial, apabila ada pemicunya maka kerusuhan dapat meletus.

Mobilisasi massa kerusuhan di Sirau

Mobilisasi massa yang dimaksud adalah suatu proses yang mendorong anggota kelompok dalam masyarakat agar bersedia mengorbankan tenaga dan kemampuannya untuk melakukan tindakan kolektif demi kepentingan bersama. Mobilisasi massa akan dapat berjalan kalau ada pemicu atau yang menjadi penyebab awal. Karena tidak mungkin kalau kekecewaan dan ketidakpuasan akan langsung menjadi kerusuhan sosial, apabila tidak ada yang menjadi pemicunya. Kemudian pemicu itu merupakan suatu kejadian sebagai rentetan peristiwa, maka untuk menggugah massa diperlukan mobilisasi, sehingga akan dapat membakar kekecewaan itu, yang dapat meletus kerusuhan sosial.

Dari hasil temuan dilapangan melalui kuesioner yang disebar sejumlah 135 responden yang menyatakan sebagai pemicunya adalah pengumuman hasil perhitungan suara sejumlah 56 responden atau 41,5 persen. Melihat data ini bahwa sebagai pemicunya adalah pengumuman hasil perhitungan suara yang mengakibatkan massa kecewa karena mendengar pengumuman calon yang didukung tidak berhasil atau kalah.

Setelah mendengar pengumuman calonnya kalah, para botoh melakukan pelemparan batu kearah tempat pemungutan suara dan Balai Desa. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan protes. Kemudian tindakan itu diikuti oleh massa pendukung yang kalah melakukan tindakan pelemparan batu dan pembakaran Balai Desa dan Polindes. Selanjutnya massa yang marah bergerak menuju sasaran lain yaitu mobil, rumah, toko dan penggilingan padi untuk dirusak dan dibakar. Massa masih belum puas untuk melakukan protesnya dengan mendatangi petugas Hansip untuk dilucuti pakaian seragamnya untuk selanjutnya dibakar. Keadaan demikian seperti dikemukakan oleh Charles Tilly yang mengungkapkan bahwa tindakan kerusuhan merupakan hasil kalkulasi para pemimpin yang memobilisasikan sumber daya kelompok guna menghadapi situasi politik yang berubah (Tilly, 1978: 12).

Mobilisasi massa pada kerusuhan di Sirau digerakkan oleh para

botoh pendukung calon kepala desa yang kalah (Casno Riyadi). Kekalahan calon yang didukung disebabkan karena panitia dalam melaksanakan tugas dianggap menyalahgunakan wewenang, sehingga mengakibatkan panitia dalam menjalankan tugas tidak netral dan tidak adil.

KESIMPULAN

Kerusuhan sosial dalam pemilihan kepala desa merupakan suatu akumulasi dari berbagai kekecewaan yang sudah ada sebelumnya. Dengan diselenggarakan pemilihan kepala desa, maka menjadi sarana untuk melampiaskan kekecewaan warga masyarakat yang sudah lama terpendam. Pelaksanaan pemilihan kepala desa menimbulkan meningkatnya kekecewaan warga masyarakat, karena dalam pemilihan kepala desa banyak terjadi kecurangan.

Kerusuhan yang terjadi di Sirau merupakan akibat dari kombinasi faktor struktural dan faktor psikologis. Secara struktural adalah sistem yang memberi peluang kepala salah satu calon dengan memberi fasilitas dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat menguntungkan salah satu calon kepala desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan panitia yang tidak melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara psikologis adanya perasaan kekecewaan yang mendalam karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada sesama kelompok dalam masyarakat desa Sirau. Hal ini nampak pada proses perhitungan suara, sehingga merugikan salah satu kelompok yang menjadi pendukung dalam pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gurr, Ted Robert, 1970, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Galtung, Johan, 1980, *The True Worlds: A Tansnational Perspective*, The Free Press, New York.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pesta Demokrasi Pedesaan (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa, P3PK, UGM, Yogyakarta*.
- Kasto, 1997, *Handout Demografi Umum*, Program Studi Kependudukan, UGM, Yogyakarta.
- Kansil, 1984, *Desa Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mas' oed, Mohtar, 1997, *Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, P3PK, UGM, Yogyakarta.
- Masotti, Louis.H. and Don.R. Bowen (ed), 1968, *Riots and Rebellion, Civil Violence in*

the Urban Community, Sage Publications, California.

Nasikun, 1995, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Panggabean, S.R., 1997, *Mengidentifikasi Indikator Kerusuhan*, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, UGM, Yogyakarta.

Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Saharjo, Aris, dkk., 1999, *Rusuh di Kebumen 7 September 1998*, ISAI, Yogyakarta.

Scopol, Theda, 1979, *States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, Cambridge University Press, New York.

Shost, James F. and Marvin E. Wolfgang (ed), 1972, *Collective Violence*, (Chicago, Aldine).

Sutresna, Widya, 1998, "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, dkk., 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Suryo, Djoko, 1997, "Kerusuhan Lokal Dalam Perspektif Sejarah", *Majalah Ulumul Qur'an*, No. 5/VII/1997, Jakarta.

Surianingrat, Bayu, 1981, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Aksara Baru, Jakarta.

Sunardi, 1997, *Teori Ketahanan Nasional*, Hastannas, Jakarta.

Syaiful, M, 1996, "Negara dan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Politik Orde Baru : Implementasi UU No.5 Tahun 1979 di Lampung", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Tarrow, Sidney, 1994, *Power in Movement, Social Movements, Collective Action and Politics*, Cambridge University Press, Australia.

Tilly, Charles, 1978, *From Mobilization to Revolution*, (Reading, MA: Addison-Wesley).

Trijono, Lambang, 1997, "Paradoks Demokrasi di Indonesia: Kerusuhan pada masa kampanye Pemilu 1997", JSP, Fisipol, UGM, Yogyakarta.

Uhaib, M, 1998, "Dibalik Aksi Kekerasan Sosial : Studi Kasus Terhadap Gerakan Radikalisasi Massa-Rakyat di Situbondo", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 1997, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 1995, *Pergantian Kepala Desa (Perangkat Desa) dan Pengaruhnya Terhadap Perolehan Suara Golkar Pada Pemilu 1997*, Fisipol, UGM, Yogyakarta.

_____, 1996, "Pemuda Ulama dan Pemilu, Tinjauan Sosiologi Politik", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Tannas, Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Wada, George and Davies, James C, 1957, *Riots And Rioters*, Institute of Technology, California.